

BAB I

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Skripsi ini pada mulanya terdorong oleh beberapa literatur terbaru dalam Studi Hubungan Internasional. Dalam beberapa literatur tersebut para penulis terutama mereka yang memiliki *concern* terhadap perkembangan politik global saat ini, mulai memperbaharui dan menambah beberapa isu global yang sekiranya penting untuk diperhatikan. Isu-isu tersebut pada awalnya kurang mendapat tanggapan yang signifikan dalam Studi Hubungan Internasional setidaknya dalam 50 tahun yang lalu, namun mulai mendapat tanggapan dalam periode belakangan ini. Literatur dalam Studi Hubungan Internasional konvensional pada awalnya lebih terkait isu-isu politik murni mengenai hubungan antar bangsa seperti perang dan damai, perimbangan kekuatan (*balance of power*), stabilitas tatanan internasional dan lain lain, para ahli menyebutnya dengan apa yang disebut sebagai *high politic*.

Perkembangan lebih lanjut terkait dengan isu-isu lain yang lebih *low politic* seperti isu ekonomi, sosial, budaya HAM. Perkembangan tersebut tentunya terkait dengan perkembangan situasi internasional yang sangat dinamis. Apa yang dibicarakan oleh ilmu pengetahuan tentunya berkorelasi erat dengan objek yang dikajinya, begitu pula sebaliknya. Karenanya tidak dapat disangkal bahwa kompleksitas perkembangan yang terjadi dalam tatanan internasional menjadikan

.....

mempertahankan paradigma lama yang reduksionistik dengan anggapan bahwa tatanan internasional (*order*) dapat dikaji dalam satu isu sederhana dan tunggal. Tidak ada yang lebih baik kecuali lebih *adaptif* terhadap *pluralitas* wacana, dan tak ada yang dapat bertahan dalam dunia sosial kecuali berdialektika dan menyikapinya dengan bertumpu pada *kontekstualitas*.

Ilmu Hubungan Internasional memang merupakan lebih muda usianya namun perkembangan objek kajiannya yang dinamis membuat akselerasi dalam kematangan teori dan isu yang diangkatnya. Salah satu isu tersebut terkait dengan era baru atau *new order* dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam. Kita mengenalnya secara sederhana dengan istilah "*globalisasi*" dimana dunia akan dirancang sedemikian rupa sehingga lebih terintegrasi dari pada sebelumnya, hal ini tentunya akan memunculkan beberapa *konsekwensi-konsekwensi* baru yang tidak selalu positif sebagaimana yang sering digembar-gemborkan oleh paradigma *neo-liberalisme* seperti kesejahteraan global, demokrasi, perdamaian dunia dan lain-lain.

Dalam era baru ini kita tidak hanya mengenal keoptimisan tetapi kita juga mengenal kebuntuan atau bahkan kehancuran masyarakat dalam *perspektif* lain, keduanya perlu mendapatkan tanggapan dalam porsi yang seimbang agar tidak terjebak dalam *triumphalisme* (faham tentang kebenaran dan kemenangan salah satu paradigma) yang tidak lain adalah *catastrophe* atau bencana besar dalam ilmu sosial.

Untuk menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, dalam hubungan antar bangsa dan negara, khususnya segala yang berhubungan dengan Amerika Serikat sebagai negara super power, maka sangat wajar apabila banyak orang tertarik

akan sepak terjang negeri adidaya itu dalam konteks internasional sekarang, termasuk penulis sendiri yang berkeinginan mengetahui lebih dalam mengenai Amerika Serikat khususnya dalam hubungannya dengan kawasan Asia Timur.

Mengapa Asia Timur yang dipilih karena kedinamisan kawasan tersebut, berbagai tarik ulur kepentingan besar di dalamnya , tingginya potensi konflik yang didukung dengan kemampuan negara-negara di kawasan ini daripada kawasan lain, seperti Timur Tengah misalnya, sehingga analisa mengenai peran dan keterlibatan Amerika Serikat di kawasan ini menjadi terlihat terlalu dominan, baik dari sudut pandang penulis maupun kemungkinan juga dari negara-negara yang terlibat langsung di kawasan ini. Penulis akan mengkaji uraian tersebut dengan tema besar **“Kebijakan Keamanan Amerika Serikat di Asia Timur Periode Kedua Presiden George W. Bush”**

B. TUJUAN PENULISAN

Secara garis besar ada dua tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Keamanan Amerika Serikat di Asia Timur Periode Kedua Presiden George W. Bush”** ini, *Pertama*, mencari pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis mengenai kebijakan Amerika Serikat dalam bidang politik dan keamanan regional Asia Timur, dimana didalamnya terdapat kepentingan-kepentingan Amerika Serikat, disamping pula ancaman potensi konflik dengan RRC yang secara pasti mulai bergerak sebagai satu kekuatan super

dunia, yang dalam konteks regional memuat konflik RRC-Taiwan, serta potensi konflik di semenanjung Korea dalam hal ini isu nuklir Korea Utara dan terorisme. Hal inilah yang perlu dikaji lebih dalam mengingat peran AS sebagai *satu-satunya* negara adidaya di dunia yang mengklaim berhak menjaga stabilitas keamanan dunia, termasuk juga di Asia Timur yang dipandang memiliki potensi sebagai kompetitor utama dalam berbagai hal khususnya keamanan. *Kedua*, untuk meraih gelar sarjana Strata 1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Mengamati Amerika Serikat dari berbagai aspek termasuk kebijakan-kebijakannya selalu menarik untuk disimak. Pasca kejatuhan Uni Sovyet sampai satu dasawarsa setelah peristiwa 11 September 2001, Amerika Serikat kini menjadi pemain tunggal panggung politik dunia sebagai negara adidaya, super power dan bahkan mengklaim sebagai pemimpin terdepan dalam perang melawan terorisme, penegakan HAM dan nilai-nilai demokrasi.

Dalam perkembangannya, kebijakan keamanan Amerika Serikat di Asia Timur juga semakin terasa kehadirannya. Isu RRC-Taiwan sampai masalah semenanjung Korea dengan Korea Utara sebagai aktor antagonisnya karena menyangkut nuklir dan terorisme telah membuat peran Amerika Serikat semakin diharapkan dan juga sekaligus dipertanyakan.

Amerika Serikat pasca perang dingin adalah Amerika yang mengalami pergeseran mendasar bagi peran seorang Presidennya, dimana sebelum berakhirnya perang dingin dengan ancaman Soviet, kekuasaan Presiden jauh meninggalkan batas-batas yang ditetapkan oleh konstitusi,¹ menjadi terbatas oleh semakin meningkatnya peran Kongres, kelompok kepentingan, dan media massa. Disamping itu juga dipicu oleh Kongres yang meninjau kembali batas-batas wewenang Presiden yang tidak menginginkan terjadinya kembali tragedi Watergate atau perang Vietnam yang memalukan bangsa Amerika.² Presiden Amerika Serikat pasca perang dingin menjadi rentan terhadap tekanan-tekanan Kongres. Sebagai contoh, Presiden Clinton yang dua kali terpilih pasca perang dingin menjadi satu-satunya Presiden dalam sejarah yang paling banyak mendapat kritikan publik.

Pada tahun 2000, George W. Bush, calon dari Partai Republik, juga merupakan putra dari mantan Presiden George Bush terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Di periode pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat, G.W. Bush dihadapkan pada tantangan-tantangan yang lebih kompleks seperti halnya era Presiden pasca perang dingin sebelumnya, yaitu hilangnya ancaman Soviet yang dengan sendirinya mengurangi popularitas politik luar negeri, dan berakibat meningkatkan faktor-faktor domestik dalam proses pengambilan politik luar negeri.³ Sikap tidak konsisten yang sering sekali diterapkan Amerika Serikat dalam pelaksanaan politik luar negerinya juga seringkali mewarnai perjalanan kebijakan luar

¹ Bambang Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Jogjakarta: Lingkar, 2003, hal.146

² ibid

³ ibid

negeri negeri Paman Sam tersebut, dan hal ini justru semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya Sovyet yang berujung pada superioritas tunggal Amerika Serikat. Sikap inkonsistensi serta standar ganda sering muncul akibat Amerika Serikat sering merasionalisasi konsepsi moral dalam tujuan politik luar negerinya, namun disatu sisi Amerika Serikat tidak dapat menghindarkan diri dari kepentingan-kepentingan pragmatisnya. Sebagai contoh sikap dan pernyataan Amerika mengenai penegakan demokrasi dan hak asasi manusia patut dipertanyakan manakala menyaksikan kenyataan bahwa Amerika tidak mendorong demokratisasi di Saudi Arabia, bahkan cenderung bersikap diam terhadap rendahnya derajat demokratisasi di Saudi Arabia serta senantiasa menunjukkan dukungan yang jelas terhadap penguasa Saudi Arabia yang otoriter. Padahal sebagaimana diketahui Amerika Serikat senantiasa menyebut dirinya sebagai "*the champion of democracy*" dengan tradisi demokrasi paling kuat yang berniat "*making the world safe for democracy*". Namun disisi lain Amerika Serikat tidak mendukung proses demokratisasi di Saudi Arabia bahkan mendukung pemerintahan Saudi Arabia yang otoriter.⁴

Kebijakan Amerika Serikat di Asia Timur, khususnya terhadap RRC dan Korea Utara merupakan isu utama keamanan di kawasan ini. Amerika Serikat biasanya selalu menekankan nilai-nilai HAM dan nilai-nilai demokrasi ke berbagai penjuru dunia. Berkaitan dengan HAM, sebagaimana halnya dengan isu-isu global lainnya, pemecahan bagi sebuah persoalan sering memerlukan diadakannya sebuah perubahan dalam kebijakan politik pemerintah, bahwa pemerintah harus

⁴ Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2000. hal 211

menghentikan kekerasan terhadap warga negaranya, mengizinkan didirikannya serikat pekerja, atau menyelenggarakan pendidikan umum bagi warga negaranya. Negara sendiri masih menduduki posisi yang unik dalam kerangka HAM, sebab struktur kekuasaan politik dewasa ini masih menyerahkan kedaulatan tertinggi kepada negara untuk melindungi dan menjalankan hak-hak warga yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Di sinilah letak paradoksnya; di satu pihak negara merupakan pelanggar utama (meskipun bukan yang terutama) atas HAM, di lain pihak institusi ini juga merupakan pelindung yang utama (meskipun juga bukan yang terutama).

Pada isu-isu HAM inilah Amerika Serikat menekan negara-negara lain, seperti China termasuk juga Korea Utara yang dituduh memenjarakan dan menindas aktivis-aktivis pro-demokrasi serta tidak melaksanakan proses demokratisasi di negaranya. Sedangkan tantangan-tantangan khususnya di Korea Utara berasal dari beberapa front, seperti senjata-senjata pemusnah massal (nuklir, biokimia, dan peluru kendali), ancaman kemanusiaan termasuk kelaparan, pembangkangan, dan pengungsi massal yang potensial, serta ancaman militer konvensional. Dan, hambatan utama untuk mengatasi aneka tantangan ini muncul dari realitas bahwa tidak ada konsensus di antara negara-negara bertetangga, yang dipengaruhi secara langsung atau tak langsung oleh tiap manuver Pyongyang.

Berbagai tantangan di Asia Timur khususnya China dan Korea Utara ini membuat Presiden Bush harus melakukan perundingan dan kerjasama dengan aktor-aktor politik diluar Presiden dalam merumuskan dan menjalankan politik luar negerinya. Maka muncullah kebijakan berupa embargo militer dan embargo ekonomi

terhadap China dan Korea Utara, baik langsung dari pemerintahan Amerika Serikat maupun melalui berbagai organisasi internasional, seperti PBB, IMF, WTO dan lainnya. Kebijakan seperti ini memang sudah lama diterapkan oleh Amerika Serikat di seluruh penjuru dunia, karena cara ini dipandang lebih efektif daripada menggunakan pendekatan kekerasan (militer) yang cenderung dihindari dan diharamkan dalam konteks internasional dewasa ini.

Isu terorisme menjadi lebih terasa pada periode kedua jabatan Presiden G.W. Bush, dimana Amerika mengalami perubahan mendasar ketika terjadi serangan teroris 11 September 2001. Pada dasarnya, kebijakan Bush setelah 9/11 cukup mengejutkan dunia dimana dia mengatakan siapa yang tidak bergabung dengan Amerika untuk memerangi teroris, maka akan menjadi musuh Amerika.⁵ Pernyataan Bush begitu jelas dan tegas. Ia membuat garis yang tegas, "Anda bersama kami atau Anda bersama dengan teroris." Lewat pernyataannya itu, Bush memaksa setiap negara berpihak kepadanya (AS) apabila tidak ingin dianggap sebagai musuhnya. Dalam pernyataan itu juga terkandung arogansi Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya yang mampu memaksakan kehendaknya kepada bangsa lain

Apa yang dikampanyekan oleh Bush, ternyata sama dengan apa yang pernah disampaikan oleh John Foster Dulles pada masa permulaan Perang Dingin 1950-an. Untuk mempertegas posisi Amerika yang sedang memusuhi Sovyet, Dulles mengatakan bahwa: *"to all the Asian and African countries that there are only two*

⁵ Kamaruzaman Bustamam-Ahmad, Satu Dasawarsa The Clash of Civilizations: *Membongkar Politik Amerika di Pentas Dunia*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Press, 2003, hal. 167

alternative either they going to join Washington, or they join Moscow".⁶ cara yang digunakan Amerika saat permulaan Perang Dingin hampir sama dengan yang dilakukan pasca 9/11 ketika menggulirkan isu-isu terorisme.

Hasil dari kampanye anti terorisme Bush telah tampak, yaitu runtuhnya rezim di Afghanistan dan Iraq, yang tidak menutup kemungkinan juga di belahan dunia lain tidak terkecuali kawasan penuh gejolak seperti Asia Timur. Berbagai isu keamanan di Asia Timur telah menyebabkan Amerika Serikat turun tangan untuk melindungi kepentingan mereka atas kawasan ini, seperti sebelum kembali terpilihnya Bush, bahkan dengan tantangan-tantangan baru yang lebih kompleks. Di pihak lain, Amerika Serikat kini semakin tidak populer di hampir seluruh penjuru dunia. Sebagai tambahan, setelah insiden "9/11", Amerika Serikat telah mengubah banyak pandangan dunia mereka dan menjadi kurang toleran terhadap ancaman potensial atas kepentingan mereka. Negara ini menjadi lebih histeris dalam perilakunya dan kurang dapat menerima suara-suara berbeda dalam masalah-masalah utama global. Tantangan Amerika Serikat dalam peta strategis regional dan global saat Bush terpilih kembali, diantaranya dengan menetapkan negara-negara yang tak bersahabat, perang melawan terorisme dan senjata pemusnah massal, serta opini dunia yang memojokkan mereka karena tindakan unilateral mereka, seperti pada kasus Afghanistan dan Iraq.

Apabila kita akan membahas tantangan-tantangan keamanan dan ekonomi di Asia Timur saat ini, Semenanjung Korea mungkin masuk dalam daftar peringkat

⁶ ibid

teratas. Utamanya adalah ketakutan Amerika Serikat akan adanya hubungan Korea Utara dengan terorisme, yang berujung pada masalah ancaman senjata nuklir dan senjata-senjata pemusnah massal dari Korea Utara, serta tidak ketinggalan juga tentunya isu kemanusiaan lainnya, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan kekurangan pangan kronis, ini semua tidak hanya mempengaruhi Korea Selatan (Korsel), tetapi juga akan membawa dampak serius bagi stabilitas kawasan, kecuali jika semua kekuatan utama menangani tantangan multifaset ini secara hati-hati. Sementara itu selama ini, khususnya setelah 9/11 AS cenderung bersifat tanpa kompromi dan konfrontatif terhadap Korea Utara dan menganggap Korea Utara sebagai poros setan bersama Iraq dan Iran, yang mendukung terorisme, daripada bersikap lebih fleksibel seperti ditunjukkan Korea Selatan dan China.

Dalam masalah China –Taiwan juga sangat penting bagi Amerika Serikat, yang selama ini mengakui satu China dalam kebijakan luar negerinya, meski pada kenyataannya Amerika Serikat cenderung melindungi Taiwan. Semakin kuatnya China (ekonomi dan militer) menambah kekhawatiran tersendiri bagi Amerika Serikat maupun stabilitas kawasan. Amerika Serikat selama ini cukup lunak terhadap China, akan tetapi dengan penilaian bahwa China diperkirakan akan menjadi kekuatan militer utama di Asia Pasifik yang ditunjukkan dengan peningkatan anggaran militernya seperti yang dikutip oleh The Washington Post, yang dalam laporan tahunannya, Pentagon menyebutkan bahwa anggaran militer China bisa mencapai 90 miliar dollar AS pada tahun 2005 atau tiga kali lebih besar dari anggaran yang dirilis oleh pemerintah China, yang berarti merupakan anggaran

militer ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia.⁷ China juga dipandang mampu mengambil tindakan militer di Laut China Timur untuk menjaga kepentingannya.

Dari kedua periode jabatan Bush diatas terdapat perbedaan, meski tidak terlalu signifikan, yaitu lebih tegasnya isu terorisme mewarnai garis politik Luar Negeri Amerika Serikat, terutama pasca 9/11, bahkan bisa menjadi berlebihan jika kita melihat dari sudut pandang Bush, dimana ketika kejahatan transnasional yang berupa terorisme dikaitkan dengan aktor politik internasional negara bangsa yang sah seperti yang dituduhkan Bush terjadi di Afghanistan, Iraq, Iran, Suriah, Libya, dan tentunya Korea Utara.

Berbagai tantangan, dan kenyataan diatas membuat Bush dengan jajaran pemerintahannya akan berupaya keras mencari solusi terbaik bagi terciptanya stabilitas kawasan yang selama ini sesuai dengan strategi yang Amerika Serikat inginkan. Keinginan Pemerintahan Bush bisa saja terlaksana jika semua kepentingan di kawasan ini terakomodasi, tetapi jika keinginan itu berbenturan dan justru menimbulkan konflik-konflik baru yang tidak diinginkan, akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana strategi Bush di Asia Timur ke depannya, yang akan bermuara pada bagaimana kebijakan Bush pada periode kedua jabatannya. Hal ini perlu kita kaji lebih dalam, sehingga strategi Bush dan pemerintahannya di masa kedua jabatannya di Asia Timur menjadi menarik untuk kita analisa dan prediksi.

⁷ *Kompas*, 21 Juli 2005, hal. 9

D. POKOK PERMASALAHAN

Dengan melihat uraian latar belakang masalah, maka dapat ditarik suatu benang merah yang menjadi pokok permasalahan. Pokok permasalahannya adalah :
“Bagaimana kebijakan keamanan Pemerintahan Presiden George W. Bush di Asia Timur setelah terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat?”.

E. KERANGKA DASAR TEORI

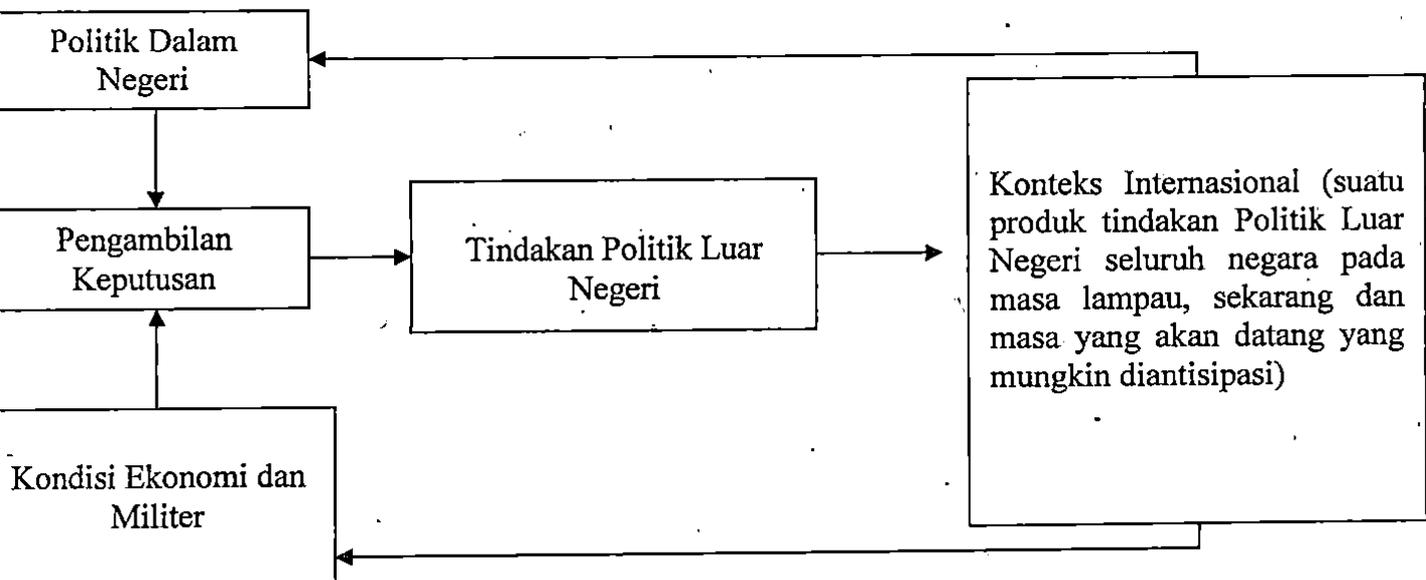
Untuk menganalisa suatu permasalahan yang kita hadapi dalam hubungan internasional, diperlukan suatu teori yang relevan. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisa politik luar negeri Amerika Serikat dalam bidang keamanan di Asia Timur sebagai berikut:

Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri.

Menurut William D. Coplin pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan politik luar negeri dipengaruhi oleh tiga variable, yaitu;

1. Kondisi politik dalam negeri (*domestic politics*) di negara tersebut, termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik aktornya.
2. Kemampuan ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk aktor geografi yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan serta hubungan negara tersebut dalam perdagangan dan keuangan.

3. Konteks Internasional (*international context*), kondisi-kondisi internasional pada saat itu, termasuk negara yang berbatasan dengan satu negara akan mendorong tindakan- tindakan luar negeri negara tersebut



Ilustrasi (gambar) proses pembuatan kebijakan Politik Luar Negeri William D. Coplin⁸

Ilustrasi skema tersebut diatas menjelaskan interaksi variabel sehingga menghasilkan tindakan politik luar negeri suatu negara yang dapat dikategorikan ke dalam dua aktor yang internal dan eksternal. Dan dari teori tersebut akan digunakan

⁸ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional, Suatu Telaah Teoritik*, (terj), Sinar Baru Bandung, 1992, Hal.30

untuk menjelaskan apa yang mungkin dilakukan Amerika Serikat dalam kebijakan keamanannya di Asia Timur.

Dari faktor **politik dalam negeri**, termasuk didalamnya faktor budaya sebagai dasar tingkah laku, dimana para perencana kebijakan luar negeri biasanya bekerja dengan mengacu kepada pengalaman-pengalaman yang telah lampau. Dan kebijaksanaan yang dihasilkan akan berasal dari pertimbangan tradisi atau budaya yang tertanam secara mendalam dalam sejarah nasional yang merupakan lanjutan dari kebijaksanaan terdahulu, kemudian diketengahkan dalam pengalaman sekarang. Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari pengaruh aktor-aktor dalam negeri, meliputi para birokrat, partai politik, kelompok kepentingan dan opini publik. Salah satu unsur yang penting dalam proses diatas adalah pengaruh opini publik yang disalurkan melalui partai-partai politik dan kelompok-kelompok berkepentingan.⁹ Situasi politik dalam negeri juga ikut berperan dalam mempengaruhi pembuatan keputusan adalah sebagai akibat dari adanya perubahan orientasi suatu negara atas lingkungan internasional. Bila situasi politik dalam negeri berjalan dengan baik tentunya akan sangat mendukung dalam melahirkan kebijakan demi tercapainya tujuan suatu negara.

Dalam konteks internal saat ini, di Amerika Serikat muncul kelompok neo-konservatif, dimana mereka adalah orang-orang terdekat Bush, yang banyak mempengaruhi arah kebijakan Bush. Adapun yang dimaksud dengan "mereka"

⁹ Rodee, *Pengantar Ilmu Politik*, alih bahasa : Zulkifly Hamid (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal,526.

adalah Dick Cheney, Donald Rumsfeld, juga termasuk di dalamnya Menlu Rice, Paul Wolfowitz, dan beberapa staf lainnya. Sejak Bush berkuasa, Rice bersama para tokoh neo-konservatif semisal Wapres Dick Cheney dan Menhan Donald Rumsfeld telah mengedepankan sikap *unilateralisme* dalam menggerakkan roda kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dengan sikap yang sewenang-wenang ini, Amerika Serikat tak segan-segan menginvasi dan menduduki Afganistan dan Irak serta mengobarkan perang tanpa batas waktu yang mereka sebut sebagai perang melawan teroris. Selama empat tahun tampil sebagai aktor di panggung politik Amerika Serikat, Rice memang tidak tercatat sebagai anggota resmi kubu neo-konservatif. Namun, selama itu dia selalu berpihak kepada kebijakan kelompok “gila perang” tersebut di depan kebijakan kubu moderat atau yang juga disebut kubu akomodasionalis.¹⁰ Ketika negaranya sedang dalam keadaan berperang. George.W.Bush terpilih kembali menjadi presiden Amerika Serikat pada bulan November 2004 atas lawannya dari partai Demokrat, John.F.Kerry. George.W.Bush terpilih kembali dikarenakan para konstituen partai Republik, terutama mereka yang memilih Bush bukan berdasarkan idiologi, atau pilihan turun menurun, namun dikarenakan program kerja yang ditawarkan George.W. Bush, antara lain keamanan nasional, melalui pemberantasan terorisme. Dari janji program kerja pemberantasan terorisme inilah akan ada tuntutan penyelesaian kasus Irak, yang diharapkan bisa menghilangkan terorisme.

Sementara itu dari **konteks ekonomi**, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi dalam negeri yang berkepanjangan akibat kebijakan politik luar negerinya

¹⁰ www.irib.ir/worldservice/melayuRADIO/arsip_berita/januari05/18jan2005.htm

dalam membendung komunisme sejak pasca Perang Dunia II, sehingga mempengaruhi kemampuan kekuatan ekonomi Amerika Serikat sebagai negara ekonomi besar menjadi menurun Bahkan menjadi negara pengutang dari negara bekas musuhnya di Perang Dunia II (Jepang dan Jerman) serta negara pengutang terbesar di PBB.

Perekonomian Amerika Serikat terlihat melemah sejak terjadinya perang di Irak, hal ini dikarenakan alokasi anggaran untuk militer mengalami peningkatan. Pada tahun 2000, nilai tukar mata uang dollar AS terhadap Euro berkisar pada 1.08540, yang berarti satu dollar bisa mendapatkan lebih dari satu Euro, dan nilai dollar AS terus menguat terhadap Euro sampai tahun 2002, namun sejak terjadinya perang Irak, justru nilai tukar Euro lebih tinggi daripada Dollar AS, yaitu pada 0.8048 Euro untuk satu dollar AS (2004). Korban jatuh di Irak juga banyak, tercatat korban tentara Amerika Serikat saat ini mencapai 1.738 orang, 88 orang dari Inggris, dan 93 lainnya dari negara lain¹¹ Hal ini menyebabkan perdagangan internasional Amerika Serikat juga terus mengalami kemerosotan. Isu ekonomi yang merupakan alat ampuh bagi aktor-aktor politik dalam negeri untuk meraih ataupun melanggengkan kekuasaan, berupaya keras mengeluarkan paket kebijakan ekonomi terbaik bagi rakyat yang meliputi kebijakan fiskal, moneter perdagangan dan industri serta kebijakan energi dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu dengan berbagai cara pemerintahan Bush dan Partai Republik yang sedang berkuasa kembali saat ini akan terus mencoba memperkuat kembali kemampuan perekonomian Amerika Serikat

¹¹ *Kompas*, Kamis, 30 Juni 2005, hal 10

yang telah menurun, salah satunya dengan menjaga stabilitas keamanan, baik nasional, regional, dan juga internasional. Dalam konteks regional dan internasional, kawasan Asia Timur merupakan prioritas karena dipandang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di masa kini dan masa yang akan datang.

Sementara itu, dalam **konteks militer**, Amerika Serikat selalu menjadikan kemampuan ekonomi dan militer suatu negara sebagai pertimbangan utama dalam arah kebijakan pertahanan dan keamanan negaranya dalam menjalin hubungan dengan negara yang bersangkutan, hal ini tidak mengherankan karena setelah era perang dingin, isu ekonomi lebih penting daripada sekedar pertentangan ideologi. Akan tetapi, berakhirnya perang dingin bukan berarti berakhir pula permasalahan militer Amerika Serikat, hal ini justru berdampak over supply bagi Amerika Serikat karena kemampuan militernya yang dahsyat sementara media “military project” mereka terbatas.

Runtuhnya Sovyet bukan berarti pula negara penganut sosialisme-komunisme di Asia Timur (RRC dan Korea Utara) tidak mempunyai arti penting bagi Amerika Serikat. Keberhasilan ekonomi RRC sangatlah diperhitungkan oleh Amerika Serikat. Dampaknya terlihat pada pembangunan China dan peningkatan anggaran belanja militer China, yang secara mantap telah memperbaiki kekuatan dan ketetapan senjata-senjata serta kecanggihan sistem peluncurannya. Dalam laporan tahunannya, Pentagon yang dikutip *The Washington Post*, Rabu (20/7)¹² mengungkapkan bahwa Beijing telah meningkatkan dan memperluas persenjataan nuklirnya dengan

¹² *Kompas*, 21 Juli 2005, hal 9

mengembangkan nuklir yang lebih *advanced* dan mampu menjangkau India, Rusia dan “seluruh Amerika Serikat”.¹³ Berdasarkan laporan Pentagon itu terlihat bahwa investasi pertahanan China lebih “mencengangkan” daripada apa yang diduga oleh Amerika Serikat, apalagi ditambah dengan akan dicabutnya embargo senjata oleh Uni-Eropa atas China yang sudah diberlakukan sejak 1989. Sejumlah pejabat Amerika Serikat termasuk menlu Rice mengkhawatirkan teknologi persenjataan canggih Eropa akan diadaptasi oleh China untuk memerangi tentara Amerika Serikat seandainya mereka harus membela Taiwan dalam perang dengan China. Dalam pernyataannya Rice mengatakan, “*The European Union should do nothing to contribute to a circumstance in which Chinese military modernization draws on European technology or even the political decision to suggest that it could draw on European technology.*”¹⁴

Dalam masalah semenanjung Korea, tidak kalah peliknya bagi Amerika Serikat, setelah untuk kali pertama Korea Utara mengakui memiliki senjata nuklir(10/2)¹⁵ seperti yang sudah dituduhkan Amerika Serikat sebelumnya. Sejak 2002 Amerika Serikat memang gencar menuding Korea Utara mengembangkan senjata nuklir, negeri adidaya tersebut mengancam menggunakan cara kekerasan jika Korea Utara tidak menghentikan program nuklirnya. Sementara itu Korea Utara tidak kalah sengitnya dengan menyebutkan bahwa senjata nuklir mereka gunakan untuk perlindungan dari ancaman invasi Amerika Serikat. Perundingan yang melibatkan 6

¹³ *Ibid*

¹⁴ www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A51181-2005Mar20.html

¹⁵ *Jawa Pos*, 11 Februari 2005, hal 12

negara pun digelar untuk membahas masalah tersebut, tetapi tidak pernah ada kata sepakat bagi keduanya.

Kemampuan militer baik nuklir maupun konvensional yang besar menyebabkan kawasan Asia Timur semakin eksplosif yang selanjutnya akan memancing timbulnya konflik. Keterlibatan Amerika Serikat di kawasan ini semakin mempertegas peran dan kepentingan negara itu di Asia Timur.

Dalam **konteks internasional**, yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain di dalam sistem internasional. Secara tradisional, kondisi dari sistem internasional akan menentukan bagaimana negara tersebut akan berperilaku, serta dapat diartikan sebagai produk berbagai keputusan dan tindakan politik luar negeri pada masa lampau, sekarang dan yang akan datang yang akan diantisipasi. Konteks internasional juga erat kaitannya dengan situasi negara yang menjadi tujuan politik luar negeri dan pengaruh negara lain. Karena setiap negara akan memiliki sejumlah keterlibatan dan perhatian pada sistem internasional yang merupakan arena politik luar negeri.

Pada saat ini, isu terorisme merupakan isu utama. Isu terorisme gencar dikampanyekan oleh Amerika Serikat pasca serangan 11 September 2001 ke Amerika Serikat. Dengan corak agresifnya Amerika Serikat telah meruntuhkan Pemerintahan Taliban di Afghanistan dan Saddam Hussein di Iraq. Corak strategi agresif ini kemungkinan bisa mendorong tindakan negara-negara lain yang merasa terancam dan berbenturan dengan apa yang dipaksakan oleh Amerika Serikat terjadi di Afghanistan dan Iraq, yang pada akhirnya kembali kepada ancaman stabilitas keamanan kawasan,

apalagi dengan perimbangan kekuatan yang lebih seimbang seperti yang terjadi di Asia Timur saat ini.

Maka, dengan memperhatikan keempat faktor diatas (dalam negeri, ekonomi, militer, konteks internasional) terformulasikanlah suatu tindakan politik luar negeri yang merupakan strategi atau arah tindakan terencana yang dikembangkan oleh para pembuat kebijakan suatu negara terhadap negara lain atau lembaga internasional yang ditujukan untuk mencapai tujuan khusus yang didefinisikan dalam istilah kepentingan nasional.

F. HIPOTESA

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori tersebut diatas, maka hipotesa mengenai kebijakan keamanan Amerika Serikat di Asia Timur pada periode kedua pemerintahan Presiden George W. Bush diantaranya adalah:

1. Mempertahankan dunia yang unipolar.
2. Memanfaatkan isu terorisme untuk menekan Korea Utara dalam masalah pengembangan senjata nuklir.

G. JANGKAUAN PENULISAN

Penulisan ini akan dimulai dari Politik Luar Negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush yang pertama, hingga analisa dan

prediksi kebijakan negeri itu setelah terpilihnya kembali George W. Bush sebagai Presiden untuk periode keduanya. Namun demikian, pembatasan ini tidak menutup kemungkinan untuk membahas kajian di luar batas, sepanjang kajian tersebut masih mempunyai kaitan dengan pokok permasalahan.

H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penulisan ini, teknik penulisan datanya adalah data sekunder dengan melakukan library research serta dari media cetak dan beberapa literatur-literatur yang mendukung tersusunnya penulisan skripsi ini.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I akan menulis tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penulisan, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II akan menulis tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat pada periode pertama pemerintahan Presiden George W. Bush, sampai kembali terpilihnya George W. Bush sebagai Presiden Amerika Serikat pada pemilu 2004, serta munculnya kelompok Neo Konservatif di Amerika Serikat.

BAB III akan menulis tentang sikap Amerika Serikat dalam isu-isu keamanan di Asia Timur, Ketegangan China –Taiwan di Selat Taiwan, ketegangan di Semenanjung Korea menyangkut isu nuklir dan terorisme Korea Utara serta

perundingan enam (6) negara yang melibatkan Amerika Serikat, Rusia, China, Korea Utara, Korea Selatan dan Jepang.

BAB IV akan membahas tentang kebijakan keamanan Amerika Serikat terhadap Asia Timur, baik terhadap Korea Utara ataupun Republik Rakyat China, serta supremasi politik dan keamanan yang akan tetap dipertahankan Amerika Serikat di Asia Timur

BAB V merupakan bab penutup, yaitu kesimpulan dari pembahasan semua bab-bab sebelumnya.